

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KOREA SELATAN MENYELESAIKAN ISU *JUGUN IANFU* TAHUN 2015

Secara umum dalam bab IV ini akan membahas dan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemerintah Korea Selatan pada masa kepemimpinan Presiden Park Geun-hye bersedia mempercepat penyelesaian isu *jugun ianfu* pada tahun 2015. Faktor tersebut mencakup bagaimana cara pandang dan latar belakang Presiden Park Geun-hye serta peran para pembuat kebijakan lain disekitarnya, maupun faktor lain seperti adanya tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkup domestik maupun Internasional yang kemudian memengaruhi keputusan pemerintah Korea Selatan tersebut.

A. Presiden Park Geun-hye

Pada tanggal 25 februari 2013 Park Geun-hye dilantik sebagai Presiden baru Korea Selatan. Park Geun-hye terpilih sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden di negara tersebut, sekaligus presiden wanita pertama di Asia Timur. Pada pemilihan umum tahun 2012, Presiden Park menerima jumlah suara terbanyak sejak dilaksanakannya pemilu langsung di Korea Selatan tahun 1987. Ia juga berhasil memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan Presiden untuk pertama kalinya. Park Geun-hye merupakan ketua dari partai Saenuri yang merupakan partai berkuasa pada saat itu. Park bukanlah seseorang yang asing dalam dunia perpolitikan Korea Selatan, beliau adalah putri dari Presiden Korea Selatan yang ketiga yaitu Park Chung-hee. Park dilahirkan pada masa perang Korea tahun 1952. Ayahnya Park Chung-hee kemudian menjadi Presiden Korea Selatan dan

ibunya Yuk Young-soo adalah Ibu Negara yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Dari contoh yang diberikan oleh ayahnya, Park Geun-hye belajar untuk mencintai negara dan memiliki mental yang kuat. Sedangkan dari ibunya, Park banyak belajar tentang menghargai orang lain, gaya hidup yang rajin dan berhemat (Cheong Wa Dae, tanpa tahun).

Pada 1974 silam, ibu dari Presiden Park Geun-hye terbunuh oleh seorang agen Korea Utara Mun Se-gwang. Hal itu terkait dengan upaya pembunuhan ayahnya. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Park Geun-hye kemudian menggantikan posisi ibunya dan mulai melayani rakyat sebagai ibu negara pada usia 22 tahun. Ia pun seringkali mendampingi sang ayah dalam beberapa kesempatan terkait dengan urusan kenegaraan. Saat itulah Park Geun-hye banyak belajar tentang kepemimpinan. Dalam sebuah wawancara dirinya pernah menyatakan bahwa kematian sang ibu yang amat mendadak oleh agen Korea Utara merupakan tekanan yang sangat berat bagi dirinya, apalagi ia juga harus mengemban tugas dan tanggung jawab menggantikan ibunya sebagai ibu negara saat itu. Park juga menyadari bahwa Korea Utara adalah salah satu ancaman yang bisa membahayakan dirinya maupun keamanan negaranya. Hal itu tentu bukanlah hal yang mudah bagi Park.

Lima tahun setelah kematian sang Ibu, ia juga harus menerima kenyataan bahwa sang Ayah dibunuh oleh pasukan keamanannya sendiri Kim Jae-kyu. Kim adalah Direktur Badan Intelijen Pusat Korea dan orang kepercayaan Park Chung-hee. Kematian ayahnya juga meninggalkan bekas luka yang dalam dan juga kesedihan yang luar biasa padahal usianya baru 27 tahun dan harus merawat kedua adiknya. Mengingat dia hidup selama 18 tahun sebagai anak seorang Presiden, pastilah sangat sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru ini. Setelah kejadian tersebut,

Park kemudian memilih untuk menarik diri dari publik dan memilih untuk menjalani hidup sebagai rakyat biasa (Astiana, 2017). Mengenai pengalamannya selama periode tersebut, Park Geun-hye kemudian menulis sebuah buku *Despair Strengthens Me and Hope Moves Me*. Menurutnya setelah kematian sang ayah, banyak orang terdekat yang dia andalkan justru mengkhianatinya. Perubahan mendadak dalam kehidupannya inilah yang kemudian dianggap menciptakan trauma pengkhianatan oleh orang-orang terdekat bagi Presiden Park.

Park akhirnya memilih untuk kembali ke dunia politik dan pertama kali terpilih menjadi anggota Majelis Nasional Korea Selatan pada tahun 1998. Park juga sempat mendapatkan pengalaman buruk pada 20 Mei 2006, di mana dirinya pernah mendapatkan serangan dari seorang pria menggunakan pisau pada saat pemilihan lokal di Seoul. Ia mengalami luka yang cukup parah di wajahnya dan hampir tidak bisa diselamatkan jika lukanya sedikit lebih dalam (Cheong Wa Dae, tanpa tahun).

Pada tahun berikutnya, Park mulai mencoba masuk ke pemilihan Presiden pada tahun 2007. Namun partainya justru menunjuk Lee Myung-bak sebagai kandidatnya. Walaupun banyak pihak yang mengatakan bahwa kemenangannya di pemilu Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh relasi dan warisan dari sang ayah, Park tetap menunjukkan bahwa jabatannya saat ini bukan hanya dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai putri Presiden Park Chung-hee, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalamannya selama menjadi ibu negara di usia yang cukup belia. Presiden Park sendiri juga banyak mendapatkan kritik dari masyarakat konservatif di Korea Selatan atas keputusannya yang memilih untuk tidak menikah dan menyatakan bahwa dirinya telah menikah dengan bangsa, hal ini kemudian juga banyak mengundang

pertanyaan walaupun dianggap sebagai hal yang bersifat sangat pribadi.

Park juga harus berjuang untuk melepaskan dirinya dari pandangan kelompok sayap kiri di Korea Selatan yang menganggap bahwa dirinya pro terhadap pemerintah Jepang. Hal ini terkait dengan latar belakangnya sebagai putri Presiden Park Chung-hee yang dinilai sebagai pemimpin Korea Selatan yang pro terhadap Jepang. Dari persepsi Presiden Park, ia harus terus membangun kepercayaan dari rakyatnya sebagai seorang pemimpin yang akan berdiri melawan pemerintah Jepang (Hong, 2014). Ayah Presiden Park Geun-hye sendiri diketahui pernah bekerja dan bertugas di tentara kekaisaran Jepang sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan.

Sejak mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 2013, gaya kepemimpinan Park cenderung mengikuti jejak sang ayah yang tidak menerima masukan dari pihak lain terutama yang bertentangan dengannya. Dia cenderung bersifat otoriter dengan mengharapkan orang lain mengikuti jejaknya alih-alih menoleransi pandangan yang berbeda. Hal tersebut berakar dari latar belakang pribadinya yang tumbuh dengan cara melihat cara kepemimpinan sang ayah. Sama halnya ketika perjanjian sementara *jugun ianfu* berhasil dicapai, Kementerian Luar Negeri yang masih mempermasalahkan penambahan kata tidak dapat diubah lagi dalam perjanjian tersebut tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari kantor kepresidenan dan perjanjian tetap diumumkan tanpa adanya peninjauan kembali terhadap kata tersebut.

Park Geun-hye juga dikenal sebagai pemimpin yang kurang efektif dalam melakukan komunikasi publik. Dia adalah presiden pertama yang tidak mengadakan satu konferensi pers pun di tahun pertamanya. Selain menghindari melakukan konferensi pers, ia juga menolak menerbitkan pernyataan resmi

kepada publik untuk menjelaskan prakarsa kebijakan atau masalah politik dan ekonomi tertentu kepada rakyatnya. Karena kurangnya komunikasi dengan publik inilah, Presiden Park Geun-hye menerima julukan "*muk-tong*" atau "*bool-tong*" yang berarti tidak ada komunikasi. Selain kurangnya komunikasi dengan publik, Park juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak partai oposisinya. Park juga dianggap sebagai pengkhianat negara karena menyetujui dan mempercepat perjanjian terkait isu *jugun ianfu* antara Korea Selatan dan Jepang. Perjanjian yang seharusnya dicapai melalui diskusi dan negosiasi bersama dengan para korban dan aktivis justru hanya melibatkan kantor kepresidenan sebagai elemen kunci dari tercapainya perjanjian tersebut, padahal dikabarkan masih ada sekitar 46 korban *jugun ianfu* yang masih hidup di Korea Selatan. Perjanjian tersebut juga digambarkan hanya mengedepankan ambisi pemerintah tanpa mementingkan keinginan dan tuntutan dari para korban dan para aktivis (Suastha, 2017).

Presiden Park Geun-hye juga digambarkan sebagai pemimpin yang angkuh dalam hal hubungannya dengan anggota kabinet. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan Park Geun-hye ditandai dengan kerahasiaan dan kontrol dari atas ke bawah. Prioritas kebijakannya telah dirahasiakan. Staf *Blue House* dan anggota dewan politik presiden memiliki kontrol ketat atas cabang eksekutif.

Sepanjang karir politiknya, Park Geun-hye dinilai sebagai pribadi yang konsisten. Dia berpegang pada prinsipnya, menjaga janji politik dan tidak berkompromi dengan pandangan lain. Akibatnya, dia dianggap salah satu dari sedikit politisi yang bisa dipercaya dan memiliki integritas. Kekuatan Park Geun-hye sebagai pemimpin politik termasuk kepatuhan yang konsisten terhadap kebijakannya. Namun, dia memiliki kecenderungan untuk

mempertimbangkan suatu kebijakan hanya melalui serangkaian alternatif yang sempit dan pertimbangan yang kurang matang sehingga dikhawatirkan suatu saat akan menjadi masalah yang serius. Pola pikirnya cenderung tetap terjebak di masa ayahnya, tumbuh dalam bentuk kepemimpinan hirarki dan tertutup. Dia dibesarkan dengan menyaksikan ayahnya Park Chung-hee yang merupakan pemimpin yang otoriter namun berhasil mencapai perkembangan ekonomi yang menakjubkan. Park Chung-hee mampu melakukan ini karena Korea Selatan tidak memiliki sistem demokrasi dan mayoritas penduduk menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Namun, Park Geun-hye terpilih dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kerja sama dan perundingan politik sangat diperlukan (Sung & Heo, 2017).

Pada tahun pertama pemerintahannya yang diresmikan pada Februari 2013, Park banyak mendapatkan provokasi dari Korea Utara yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan dengan negara tersebut. Pemimpin Korea Utara yang baru secara terbuka melanjutkan rencana program nuklirnya dan meluncurkan roket antar benua pada bulan desember 2012 dan percobaan bom nuklir ketiganya pada bulan february 2013. Setiap insiden disertai ketegangan dan ketakutan yang sangat besar terutama bagi pihak Korea Selatan (Seow, tanpa tahun). Hal inilah yang kemudian semakin memperkuat asumsi Presiden Park Geun-hye yang juga memiliki trauma masa lalu atas kematian sang ibu oleh agen Korea Utara untuk menjadikan negara tersebut sebagai fokus utama dari kebijakan luar negerinya. Hal ini tidak terbantahkan lagi bahwa Korea Utara menjadi elemen kunci dari agenda diplomatik Presiden Park Geun-hye karena dinilai sebagai ancaman terbesar saat ini. Dirinya juga bersumpah bahwa dirinya tidak akan mentoleransi tindakan yang mengancam keamanan nasional Korea Selatan dan

mengatakan bahwa Korea Selatan harus melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap ancaman dari Korea Utara (BBCNews, 2017).

Salah satu upaya untuk mencegah ancaman dari Korea Utara adalah dengan memperkuat kerjasama regionalnya dengan Jepang dan Amerika Serikat. Park sangat menyadari bahwa permasalahan yang membelit kedua negara terkait sejarah hingga mengakibatkan hubungan keduanya mencapai titik terendah harus segera diselesaikan. Sejak awal Park secara pribadi telah bertekad untuk menyelesaikan masalah *jugun ianfu*, dengan sifatnya yang konsisten ia tetap berusaha mencari cara agar penyelesaian masalah ini bisa segera tercapai dan dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu alasannya adalah bahwa kunci utama untuk membangun kembali hubungan yang lebih baik antara Korea Selatan-Jepang dalam semua aspek bergantung pada bagaimana kedua negara bisa menyelesaikan masalah ini. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa para perempuan yang menjadi korban juga telah berusia lanjut dan jumlahnya yang semakin sedikit karena telah meninggal dunia (Ritter, 2015)

Dengan gaya kepemimpinan Park Geun-hye yang ditandai dengan kerahasiaan dan juga kecenderungannya untuk lebih memilih alternatif tertentu dalam menentukan kebijakan, Park mengutus orang kepercayaan yaitu kepala staf Presiden Lee Byung-kee untuk melakukan diskusi bersama dengan kepala Dewan Keamanan Nasional Jepang yang dilakukan secara tertutup dan rahasia terkait dengan masalah *jugun ianfu*. Karena sifatnya yang rahasia, negosiasi yang berlangsung antara kedua negara tersebut bahkan tidak melibatkan para korban dan juga para aktivis yang harusnya memiliki peran penting dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan setelah Park mengumumkan penunjukkan Kepala Badan Intelijen Lee Byung-kee sebagai kepala staf barunya

pada tanggal 27 februari 2015. Pengangkatan Lee sebagai kepala stafnya juga dinilai sebagai upaya untuk mereformasi pemerintahannya dan mengembalikan dukungan publik, Lee juga dianggap mampu untuk membuka kembali komunikasi yang lebih baik antara Kantor Presiden dengan publik. Selain itu, Park juga dapat memanfaatkan keahlian Lee Byung-kee dalam urusan luar negeri dan keamanan dengan memberinya peran dalam mengeksplorasi perubahan potensial dalam hubungan antar-Korea dan negara-negara aliansinya.

B. Adanya Keputusan Oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

1. Mahkamah Konstitusi

Pemerintah di Korea Selatan terbagi menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi sendiri termasuk ke dalam cabang yudikatif. Para hakim dalam Mahkamah Konstitusi biasanya ditunjuk langsung oleh eksekutif dan sebagian oleh legislatif. Namun, ketika ada resolusi dakwaan tertentu yang disahkan oleh legislatif, maka dakwaan tersebut harus dikirim ke pengadilan untuk mencapai keputusan akhir dalam rangka menciptakan sistem yang terkontrol dan seimbang (South Korea Government, 2012). Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk mewujudkan perlindungan Konstitusi, melindungi hak-hak dasar masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan publik, dan memberi mandat kekuatan politik untuk berfungsi dalam batas-batas Konstitusi (Constitutional Court of Korea, 2014).

2. Keputusan Yudisial Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Terkait Isu *Jugun Ianfu*

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan Dua Keputusan Yudisial penting salah satunya berkaitan dengan isu sejarah yang melibatkan Korea Selatan-Jepang. Keputusan tersebut diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Korea pada tanggal 30 Agustus 2011 sebagai tanggapan atas sebuah banding konstitusional mengenai hak klaim mantan wanita penghibur atau *jugun ianfu* yang bekerja untuk tentara kekaisaran Jepang selama masa perang dan korban bom atom. Dalam putusannya, Pengadilan menyimpulkan bahwa terlepas dari perbedaan penafsiran Perjanjian Penyelesaian Klaim atau *The Claims Settlement Agreement* yang telah dilakukan oleh pihak Korea Selatan dan Jepang pasca perang. Kegagalan pemerintah Korea Selatan untuk mengikuti prosedur penyelesaian dan mencapai resolusi atas perselisihan terkait sejarah yang melibatkan kedua negara merupakan kelalaian tindakan dari pihak pemerintah Korea Selatan.

Tindakan tersebut selanjutnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara sebagaimana dipastikan di bawah Konstitusi. Dengan demikian, keputusan tersebut juga mengindikasikan bahwa tindakan kelambanan yang ditunjukkan oleh pemerintah Korea Selatan adalah tindakan yang inkonstitusional. Hal inilah yang kemudian yang menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Presiden Korea Selatan untuk mengadopsi sikap yang semakin kuat terhadap resolusi masalah wanita penghibur atau *jugun ianfu* sesegera mungkin.

Di balik keputusan pengadilan di Korea Selatan tersebut, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai alasan dikeluarkan keputusan tersebut. Salah satunya adalah terus berkembangnya gerakan demokratisasi dalam sejarah Korea Selatan

kontemporer dan upaya untuk merekonstruksi sejarah telah memainkan peran penting. Demokratisasi dan Karakteristik di Korea Selatan yang memandang bahwa Peradilannya mengeluarkan serangkaian keputusan kepada pemerintah justru memberi kesan bahwa pengadilan menerapkan pemberontakan melawan kekuatan politik. Selain itu, dalam sejarahnya di bawah garis panjang pemerintahan otoriter oleh presiden dengan latar belakang militer, pengadilan Korea Selatan terpaksa berfungsi sebagai alat kekuasaan negara dan sarana untuk pemerintahan. Karena alasan inilah, pengadilan terutama mencemaskan akan ketegasan independensinya dan menjaga jarak dari pusat kekuasaan politik. Demikian pula, peradilan ditandai oleh rasa kewaspadaan yang kuat dan komitmen untuk menahan kekuasaan negara. Kegagalan masa lalu untuk melindungi demokrasi dan hak-hak dasar masyarakat telah menimbulkan rasa penyesalan dan pencarian cara sebagai wujud penebusan atas kesalahan masa lalu yang telah terukir dalam budaya peradilan Korea Selatan (Okuzono, tanpa tahun).

Selain alasan di atas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa karena isu sejarah terutama berkaitan dengan persoalan *jugun ianfu* ini telah sangat mengancam hubungan baik yang terbangun antara Korea Selatan dan Jepang. Secara tidak langsung keputusan ini telah menekan para pembuat kebijakan termasuk Presiden Korea Selatan karena dinilai tidak juga bangkit dari persoalan sejarah. Banyak kalangan juga menilai akan sangat sulit bagi Korea Selatan untuk mencapai kemajuan hubungan dengan Jepang ketika pemerintah Korea Selatan sendiri tidak segera mengambil langkah pasti terkait dengan isu *jugun ianfu* yang melibatkan kedua negara.

Dengan tekanan yang kuat dari keputusan pengadilan domestik dan juga sentimen publik Korea Selatan terhadap Jepang berkaitan dengan isu sejarah, Presiden Park Geun-hye menghadapi tekanan yang kuat ketika dirinya mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang (Nishino, tanpa tahun)

C. Peran Amerika Serikat

Upaya Presiden Obama untuk meningkatkan kerjasama dalam hubungan militer, ekonomi, dan politik di Asia mencerminkan bahwa wilayah Asia Timur masih menjadi bagian yang sangat penting bagi Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Selain peningkatan hubungan dengan negara-negara Eropa dan Timur Tengah, Amerika juga menyeimbangkan dengan meningkatkan hubungan dengan negara Asia Timur untuk menguatkan posisi pemerintah Amerika Serikat.

Hubungan yang paling nyata dan menguntungkan antara Amerika dengan negara Asia Timur adalah kerjasama Trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Korea Selatan dan Jepang selama ini dianggap sebagai mitra terkuat Amerika Serikat di Asia Timur. Kedua negara juga merupakan mitra yang terikat dengan perjanjian aliansi dan menjadi tuan rumah bagi kehadiran militer Amerika Serikat yang cukup besar di negaranya.

Kesepakatan terkait isu *jugun ianfu* antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015 merupakan hasil dari setidaknya 4 tahun negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara melalui Pemerintahan Park Geun-hye dan Perdana Menteri Shinzo Abe. Kesuksesan dari perjanjian ini tidak terlepas dari peran keduanya untuk saling membuka jalan dan berkompromi terkait dengan masalah ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian ini juga merupakan

hasil dari peran penting pihak Amerika Serikat terutama dari Pemerintahan Obama. Amerika juga terus mendorong dan menekan kedua negara aliansinya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang bisa mengganggu hubungan kedua negara. Dalam melaksanakan peranannya pemerintah Amerika mengambil tindakan dengan sangat hati-hati, karena isu terkait dengan sejarah merupakan persoalan sensitif yang melibatkan kedua negara. Hal ini nantinya justru akan bisa mengancam dan berdampak buruk bagi penguatan hubungan bilateral yang telah dilakukan. Sehingga kerjasama menjadi berjalan secara kurang efisien dan ekspansif daripada yang seharusnya tercipta. Hal ini justru kemudian berakibat pada terciptanya peluang bagi China dan juga Korea Utara untuk mengeksploitasi perbedaan antar ketiganya. Perselisihan ini juga merupakan masalah bagi Amerika, karena jika pihaknya tidak segera melakukan tindakan apapun maka pihak Korea Selatan dan Jepang tentu akan berasumsi bahwa Amerika Serikat tidak melakukan banyak hal dan tidak mampu untuk mengubah perilaku suatu negara. Di sisi lain Amerika Serikat juga harus mampu menempatkan posisi Korea Selatan dan Jepang dalam persamaan perspektif sehingga permasalahan terkait sejarah tidak akan lagi menjadi penghalang bagi hubungan kedua negara di masa depan (Wicker, 2016)

Selain mencegah terjadinya konflik, hubungan yang baik antara Korea Selatan dan Jepang juga akan bisa memperluas jangkauan pilihan dalam menentukan kebijakan terhadap Korea Utara. Perwakilan pemerintah Amerika, Korea Selatan, dan Jepang sering bertemu untuk melakukan diskusi terkait respon terhadap Korea Utara melalui pertemuan informal. Walaupun Amerika selama beberapa tahun telah menekan kedua negara untuk kerjasama dan integrasi yang lebih baik, namun akibat perselisihan terutama

berkaitan dengan masalah interpretasi sejarah pihak Korea Selatan tetap menolak upaya formal untuk secara signifikan mengintegrasikan pembagian informasi intelejen dengan Jepang yang kemudian berakibat pada terbatasnya kemampuan tiga negara tersebut dalam mengidentifikasi dan merespon ancaman dari Korea Utara, rencana untuk menghadapi kontingen dari Korea Utara, dan mengkoordinasikan dengan upaya diplomatik.

Hubungan kedua negara yang merenggang dan mengalami ketegangan pada beberapa tahun terakhir serta ketidakpercayaan yang muncul akibat beberapa isu sensitif yang melibatkan kedua negara termasuk berkaitan dengan permasalahan *jugun ianfu* telah mengkhawatirkan pihak Amerika Serikat. Sehingga salah satu yang menjadi prioritas utama pemerintahan Obama adalah untuk membangun kembali hubungan baik yang terjalin antara pihak Korea Selatan dan Jepang (Alexander, 2017). Para pembuat kebijakan Amerika Serikat juga merasa bahwa perannya dalam memperbaiki hubungan yang lebih baik antara Korea Selatan dan Jepang harus lebih dikuatkan dengan pilihan untuk lebih banyak memberikan jalan dan juga memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu dan saling berkompromi melalui beberapa kerjasama trilateral yang di lakukan bersama pihak Amerika. Walaupun pada akhirnya intervensi yang kuat terhadap Korea Selatan dan Jepang tentu akan sangat beresiko bagi pihak Amerika Serikat sendiri.

Amerika secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk Korea Selatan dan Jepang agar bisa segera mencapai kesepakatan terkait isu *jugun ianfu* dan juga menekan kedua negara untuk segera membuat konsesi yang diperlukan. Pihak Amerika juga secara terang-terang menyampaikan janjinya untuk bisa memperkuat dan membangun kerjasama keamanan trilateral yang lebih kuat bersama kedua negara

aliansinya tersebut sebagai bagian dari kebijakan penyeimbangan strategisnya ke Asia terutama untuk menghadapi provokasi Korea Utara (Alexander, 2017, hal. 12).

Ketika pemerintahan Obama meneruskan kebijakan strategisnya ke Asia, pemerintah Amerika Serikat secara terbuka mengeluhkan pemutusan hubungan antara dua sekutu terdekat Amerika dan menunjukkan bagaimana hubungan buruk menghancurkan kepentingan keamanan Amerika di wilayah ini. Pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Obama secara terbuka memberikan tekanannya terhadap kedua negara untuk segera menyelesaikan isu tersebut. Namun, pihak Amerika juga menolak peran mediasi langsung bagi kedua negara karena khawatir nantinya akan disalahkan atas hasil dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, Amerika Serikat juga secara diam-diam tetap menjalin komunikasi yang intens dengan kedua negara walaupun tidak banyak ikut campur terkait dengan terlaksananya perjanjian tersebut (Alexander, 2017, hal. 10-12).

Inisiatif lainnya yang juga ditempuh oleh Amerika Serikat untuk kembali membangun hubungan baik antara Korea Selatan dan Jepang adalah tindakan nyata untuk mendekatkan kedua pemimpin negara tersebut. Dengan cara membangun lingkungan yang memungkinkan kedua negara menyelesaikan keluhan mereka masing-masing. Kontribusi penting Amerika Serikat dalam tercapainya perjanjian ini adalah memulai inisiatif untuk mempertemukan pemimpin kedua negara. Presiden Obama kemudian membawa Park Geun-hye dan Shinzo Abe dalam pertemuan puncak trilateral pada bulan Maret 2014 di sela-sela KTT Keamanan Nuklir di Den Haag (Nishino, tanpa tahun). Walaupun dalam pertemuan tersebut fokus utama pembahasan berkaitan dengan program nuklir Korea Utara, tetapi beberapa pengamat menilai bahwa

pertemuan tersebut telah berhasil membuka jalur komunikasi antara Presiden Park dan Abe. Berkat adanya pertemuan tersebut kedua negara akhirnya bersedia untuk saling berkompromi dengan melanjutkan diskusi melalui pertemuan bilateral kedua negara yang membahas penyelesaian isu *jugun ianfu* secara lebih khusus.

Dalam tahap pembahasan lebih lanjut antara kedua negara, hubungan Korea Selatan dan Jepang sempat kembali merenggang terkait isu prasasti dari fasilitas industri Jepang modern yang juga disebut dengan *Battleship Island* yang masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO. Ketika kedua belah pihak menghubungi Amerika Serikat, menurut seorang pejabat senior pemerintah mereka mengingatkan kedua negara tentang perlunya fokus pada abad ke-21 dibandingkan dengan abad ke-20 yang kemudian berhasil membuat negosiasi terkait isu *jugun ianfu* berhasil dilanjutkan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Mark Lippert mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk tetap tidak memihak, namun tetap mendorong kedua negara untuk segera mencapai penyelesaian. Sama seperti Lippert, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang Caroline Kennedy bekerja dengan para pejabat di negara mereka masing-masing. Menteri Luar Negeri John F. Kerry kemudian juga berbicara secara pribadi dengan para pemimpin kedua negara, dan kemudian menyelenggarakan makan malam bersama Abe pada musim semi di rumahnya di Beacon Hill, Boston (Eilperin, 2016)

Ketika perjanjian antara Korea Selatan terkait *jugun ianfu* berhasil tercapai pada 28 Desember 2015, pihak Amerika Serikat terutama Presiden Obama menyambut baik hal tersebut dan menyampaikan bahwa kedua negara telah mencapai terobosan baru. Sebagai wujud implementasi atas perjanjian tersebut, pada November 2016 kedua negara menandatangani

perjanjian pertukaran informasi militer yang dikenal sebagai *General Security of Military Information Agreement* atau GSOMIA. Amerika juga menyampaikan manfaat besar yang diperoleh dari kerjasama kemanan dan berbagi informasi intelejen mengingat semakin meningkatnya ancaman kawasan.